

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Mahalnya biaya politik, serta macetnya fungsi kaderisasi partai mengakibatkan terjadinya pragmatisme. Yaitu, dengan mengukung para elit (para pemodal) tersebut dalam kontestasi Pilkada. Hal itu mendorong terjadinya praktik dinasti politik dan berdampak pada partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam perayaan pesta demokrasi baik dalam Pilkada di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan pemilihan legislatif.

Praktik dinasti politik dilakukan oleh Ahmad Hidayat Mus maupun Abdul Gani Kasuba pada Pilkada Provinsi Maluku Utara, di legitimasi oleh modalitas yang kuat baik modalitas ekonomi, politik, kultural, dan sosial. Semakin banyak modalitas yang dimiliki, maka semakin menentukan kemenangan pada kontestasi Pilkada. Abdul Gani Kasuba memiliki kelemahan pada aspek modal ekonomi, ketika dibandingkan dengan Ahmad Hidayat Mus. Untuk itu, Abdul Gani Kasuba memilih wakilnya yang memiliki ekonomi yang dapat mengimbangi modal ekonomi Ahmad Hidayat Mus. Pada modal politik keduanya memiliki legitimasi yang sepadan. Dari Aspek modal kultur dan sosial Abdul Gani Kasuba lebih kuat daripada Ahmad Hidayat Mus. Karenanya, modalitas yang dimiliki oleh Abdul Gani Kasuba lebih besar dari Ahmad Hidayat Mus, sehingga mengantarkan Abdul Gani Kasuba menduduki kekuasaan sebagai Gubernur dua periode pada Pilkada 2013 dan 2018.

Praktik dinasti politik juga dilakukan melalui politik dominasi ataupun kontrol atas partai politik dalam melakukan recruitment calon kandidat yang akan mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Abdul Gani Kasuba Melakukan kontrol terhadap partai PKS dan Ahmad Hidayat Mus Melakukan kontrol atas Partai Golkar.

Hal itulah yang menyebabkan terjadinya penyempitan ruang partisipasi publik untuk terlibat dalam kontestasi Pilkada. Dalam kontestasi Pilkada Partai PKS cenderung memberikan dukungan kepada keluarga Kasuba, sedangkan Partai Golkar cenderung mendukung keluarga Mus. Dukungan partai politik diberikan berupa dukungan secara kelembagaan partai serta secara basis massa untuk memilih kandidat dari keluarga politik yang telah diusung. Dan praktik dinasti politik menyebabkan terjadinya penyempitan ruang partisipasi publik untuk terlibat dalam pesta demokrasi lokal melalui Pilkada.